

UN-REDD PROGRAMME POLICY BRIEF



Empowered lives.
Resilient nations.

Peran Sektor Swasta dalam REDD+: Kasus untuk Keterlibatan dan Opsi untuk Intervensi

Penulis: Iain Henderson^a, Jacinto Coello^a, Remco Fischer^a, Ivo Mulder^a, Tim Christophersen^b

Pesan kunci

- Sektor swasta merupakan sumber pelaksanaan, inovasi dan investasi dan merupakan pemangku kepentingan kunci dalam REDD+. Keterlibatan sektor swasta harus diperluas untuk memperlambat, menghentikan dan membalikkan hilangnya hutan.
- Dua kelompok sektor swasta utama dalam konteks REDD+: a) mereka yang berfokus pada menghasilkan penurunan emisi terverifikasi (verified emission reduction, VER) dan b) mereka yang terlibat dalam rantai pasokan komoditi yang membahayakan hutan.
- Tidak ada strategi sisi permintaan atau sisi penawaran tunggal yang bisa menjadi 'senjata ampuh' – intervensi harus digunakan dengan cara mengkombinasikannya dan harus saling menguatkan guna mencapai hasil yang diinginkan.
- Pendekatan untuk keterlibatan dibagi ke dalam empat kategori: insentif, perangkat mitigasi risiko, penetapan standard minimal dan kondisi pendukung.
- UN-REDD Programme bisa membantu negara-negara mitra dalam melibatkan sektor swasta melalui pertemuan, katalisasi dan berbagi pengalaman dan pembelajaran.

Pendahuluan

Ikhtisar kebijakan ini bertujuan untuk mendorong para perencana dan praktisi REDD+ sektor publik untuk terlibat dengan dan memobilisasi sektor swasta melalui banyak kemungkinan intervensi. Ikhtisar kebijakan ini mengidentifikasi para pelaku sektor swasta terkait, dan menguraikan potensi peran mereka, dalam konteks REDD+. Ikhtisar kebijakan ini menjelaskan mengapa keterlibatan yang lebih kuat harus dilakukan dan mempertimbangkan berbagai intervensi yang bisa merubah dampak yang diberikan oleh sektor swasta pada tata guna lahan.

Ikhtisar kebijakan ini juga menguraikan bentuk-bentuk dukungan yang UN-REDD Programme bisa berikan kepada negara. Ikhtisar kebijakan ini ditutup dengan serangkaian studi kasus yang meneliti potensi dari terlibat dengan perantara keuangan (financial intermediary) untuk memperlambat, menghentikan dan membalikkan hilangnya hutan¹ dan degradasi hutan.

Menurunkan deforestasi dan degradasi hutan dan merestorasi hutan bisa memberikan banyak manfaat bagi mata pencaharian, iklim dan keanekaragaman hayati. Perkembangan ekonomi dan kesejahteraan

^aUNEP FI

^bUNEP

manusia tergantung pada ekosistem hutan yang sehat, yang memberikan tempat berteduh, makanan, lapangan kerja, obat-obatan, air, peraturan iklim dan energi kepada lebih dari satu miliar orang².

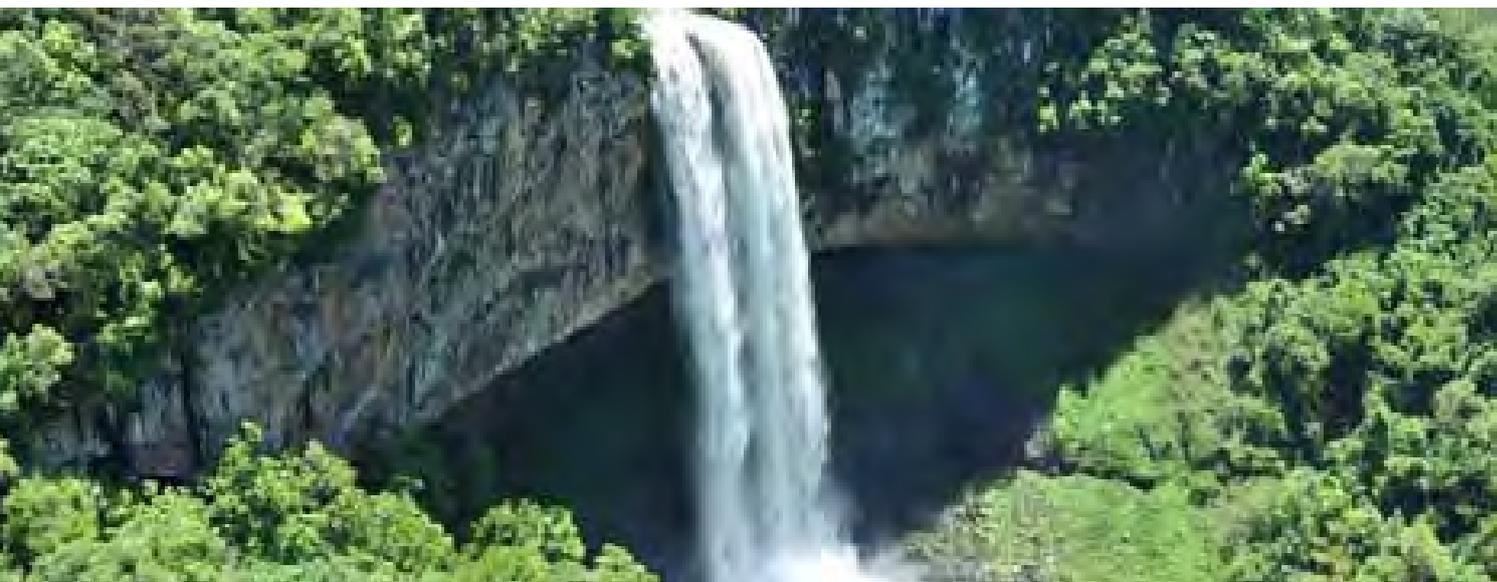
Walaupun nilai tegakan hutan sangat besar³, dan ada beberapa bukti menurunnya laju deforestasi, wilayah hutan dunia terus berkurang⁴. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hutan didominasi oleh kegiatan-kegiatan ekstraktif dan sering melibatkan perubahan hutan ke jenis guna lahan yang lain. Investasi dalam pengelolaan hutan dunia secara lestari saat ini memiliki tingkat yang rendah. Pada hakikatnya, pola perilaku ini tidak lestari, karena mengancam empat dari sembilan 'batas daya dukung bumi (planetary boundaries)', yang merupakan kondisi yang tidak bisa dinegosiasikan yang perlu dihormati dan dijaga oleh umat manusia guna memastikan kondisi yang mendukung peradaban manusia⁵: perubahan iklim, penggunaan air tawar di tingkat global, perubahan sistem lahan, dan keanekaragaman hayati. Arah pembangunan saat ini juga menentang logika ekonomi dalam kerangka waktu yang lebih panjang dan skala besar: Diperkirakan rata-rata manfaat dari menghentikan deforestasi melebihi tiga kali lipat rata-rata biayanya⁶. REDD+ merupakan suatu mekanisme yang bisa membantu masyarakat menghilangkan arah pembangunan saat ini yang tidak berkelanjutan⁷, sementara juga mengurangi tekanan pada batas daya dukung bumi. REDD+ memberikan kesempatan untuk berkontribusi kepada transisi menuju ekonomi hijau dan guna menyelaraskan pilihan-pilihan pembangunan nasional dengan sasaran-sasaran iklim dan keanekaragaman hayati global yang vital⁸.

Agar kesempatan yang diberikan oleh REDD+ terwujud, sektor swasta harus terlibat. Para pelaku sektor swasta memiliki peran mendasar yang harus dimainkan sebagai perancang, pengembang, operator dan enabler inisiatif-inisiatif yang 'ramah hutan' pada berbagai skala. Walaupun para pelaku sektor swasta merupakan agen perubahan yang signifikan, keterlibatan dengan sektor swasta dalam REDD+ sejauh ini masih terbatas. Kurangnya keterlibatan ini dikarenakan sejumlah faktor, termasuk lambatnya laju dan ketidakpastian seputar negosiasi-negosiasi REDD+ di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC*); risiko-risiko politik, ekonomi dan keuangan yang terkait dengan ketidakpastian ini; dan kurangnya pemahaman bersama tentang apa yang dimaksud dengan REDD+ dan bagaimana cara terbaik untuk memperlambat, menghentikan dan membalikkan hilangnya hutan⁹.

1. Apa yang dimaksud dengan sektor swasta?

Pelaku sektor swasta sangat beragam, dan oleh karena itu membuat generalisasi tentang sektor swasta dan mengkonseptualisasi sektor swasta sebagai satu kesatuan merupakan tantangan. Definisi yang diberikan oleh PBB tentang sektor swasta mencakup perusahaan atau badan usaha perorangan, yang mencari laba, dan komersial; asosiasi dan koalisi badan usaha serta yayasan perusahaan donor¹⁰. Dilihat dari besarnya, sektor swasta bisa meliputi mulai dari badan usaha perorangan hingga perusahaan multinasional terbesar yang mempekerjakan jutaan orang. Dari sudut pandang motivasi, sektor swasta mencakup berbagai macam, mulai dari badan-badan usaha yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan keluarga (subsisten) hingga perusahaan-perusahaan yang berfokus pada mendapatkan laba yang tinggi. Sektor swasta di sini meliputi sektor





formal dan informal¹¹, baik perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri, dan mencakup para pelaku di sepanjang rantai pasokan dan rantai nilai.

Mengingat tingkat keragaman ini, memperinci kelompok-kelompok dalam sektor swasta yang terkait dengan REDD+ perlu dilakukan. Ada dua kelompok sektor swasta yang penting, yaitu kelompok-kelompok yang terlibat dalam produksi dan penjualan VER dan kelompok-kelompok yang terkait dengan pendorong deforestasi dan degradasi¹².

- Kelompok pertama terdiri dari para pelaku yang terlibat dalam produksi dan penjualan VER, yang bisa dijual kepada pihak-pihak yang tertarik untuk membelinya baik secara sukarela ataupun dikarenakan kewajiban peraturan. Kelompok ini bisa mencakup para pengembang proyek, para penyedia jasa teknis, penyandang dana dan pembeli VER. Transaksi-transaksi VER yang dilaporkan pada tahun 2011 berjumlah US\$237 juta yang terkait dengan penurunan 26 MtCO₂e¹³. VER-VER ini berasal dari berbagai aforestasi/reforestasi (A/R Mekanisme Pembangunan Bersih), REDD+, pengelolaan kehutanan yang lebih baik dan proyek dan program agro-kehutanan.
- Kategori kedua terdiri dari para pelaku sektor swasta yang terkait dengan pendorong deforestasi dan degradasi hutan¹⁴, yang pelaku terbesarnya adalah rantai produksi dan rantai pasokan komoditi pertanian¹⁵. Para pelaku dalam kategori ini bisa meliputi para produsen bahan mentah, pemasok, manufaktur, pedagang, pedagang eceran, konsumen, penyandang dana dan penyedia jasa teknis.

Ada banyak variasi dalam kategori ini. Di wilayah-wilayah Amerika Latin, para pelaku skala besar dalam pertanian komersial yang menghasilkan barang untuk ekspor, yang sering menggunakan dana yang diperoleh di pasar-pasar

modal internasional, merupakan pendorong deforestasi dan degradasi yang signifikan. Bertentangan dengan situasi di wilayah-wilayah Congo Basin, hilangnya hutan sebagian besar didorong oleh produsen skala kecil dan produsen subsisten yang menjual barang seperti arang di pasar setempat, yang biasanya tidak terlalu membutuhkan pendanaan¹⁶. Kategori sektor swasta ini juga mencakup para pelaku yang lebih besar daripada kategori mereka yang terlibat dalam produksi dan penjualan VER. Perkiraan nilai produsen tahunan untuk kelapa sawit, daging sapi dan kedelai adalah US\$31 miliar, 14 miliar dan 47 miliar, masing-masing di tahun 2011¹⁷. Upaya yang sedikit jumlahnya untuk melibatkan sektor swasta dalam konteks REDD+ umumnya diarahkan pada kelompok pelaku pertama, sementara potensi untuk melibatkan kelompok kedua untuk mencapai REDD+ tetap tidak tergal.

Kedua kelompok ini sangat penting bagi keberhasilan REDD+, tetapi harus diingat bahwa pengelompokan ini bersifat sederhana dan tidak mencakup setiap pelaku sektor swasta terkait. Misalnya, para pelaku sektor swasta yang terlibat dalam panen hasil hutan bukan kayu bisa menjadi pengurus hutan yang penting yang tidak mendorong hilangnya hutan dan tidak masuk ke dalam kategori manapun yang telah disebutkan di atas.

Dari sudut pandang makro, pengembangan ekonomi harus terpisah dari konsumsi sumber daya hutan agar REDD+ berhasil. Paradigma baru dibutuhkan, yang akan melibatkan pilihan-pilihan ekonomi dan pembangunan yang berbeda dengan pilihan-pilihan yang dibuat oleh negara lain di masa lalu. Hal ini akan melibatkan perluasan ekonomi rendah karbon dan non ekstraktif yang baru di luar hutan yang akan memiliki bukan hanya keberlanjutan lingkungan sebagai intinya, melainkan juga harus bisa dilaksanakan secara ekonomi, sosial dan politik. Beragam pelaku sektor swasta akan memainkan peran penting dalam menciptakan paradigma baru ini.

2. Mengapa sektor swasta penting dalam perencanaan dan pelaksanaan REDD+?

Secara historis, pada hakikatnya deforestasi dan degradasi hutan terkait dengan pengembangan ekonomi. Selama seabad ini, tingkat deforestasi dan degradasi tertinggi telah bergeser, dari iklim sedang ke iklim tropis¹⁸. Pergeseran ini mempengaruhi banyak hutan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan kaya karbon, yang menjadi sumber mata pencaharian banyak rakyat termiskin di dunia.

Pergeseran geografis hilangnya hutan dibarengi dengan naiknya ekonomi pasar global. Transisi ini telah memberikan kepada sektor swasta, kebebasan yang lebih besar dalam membuat keputusan-keputusan tentang tata guna lahan dan telah meningkatkan pentingnya keputusan-keputusan yang mereka buat tentang hutan. Kenaikan jumlah penduduk dunia dan kekayaan, dikombinasikan dengan pergeseran pola konsumsi pangan dan bahan bakar menunjukkan bahwa tekanan pada lahan akan lebih besar selama beberapa dekade mendatang¹⁹. Tekanan-tekanan ini bisa diperparah oleh faktor-faktor seperti perubahan struktural siklus hidrologi²⁰ dan degradasi lahan tanpa henti²¹.

Walaupun beberapa segmen sektor swasta saat ini mendorong deforestasi dan degradasi di banyak belahan dunia, segmen-segmen sektor swasta ini dan para pelaku sektor swasta lainnya juga merupakan bagian penting dari solusinya²². Khususnya, sektor

swasta bisa berkontribusi kepada REDD+ dalam tiga bidang utama: inovasi, investasi dan pelaksanaan.

- **Inovasi:** Salah satu ciri utama sektor swasta adalah pengembangan dan penyebaran teknologi baru dan inovasi. Perusahaan-perusahaan komersial harus merespons tekanan pasar dan perlu tetap memiliki daya saing dalam lanskap lingkungan, hukum, peraturan dan fiskal yang berkembang. Perusahaan-perusahaan swasta ini melakukannya dengan memasukkan sistem, pengetahuan, teknologi dan praktik baru ke dalam operasi mereka untuk mendorong efisiensi, produktivitas dan laba. Keahlian dan kapabilitas ini akan dibutuhkan untuk memisahkan pertumbuhan dari konsumsi sumber daya dan degradasi lingkungan.
- **Investasi:** Transisi menuju ekonomi hijau akan membutuhkan perubahan struktural pada pola investasi saat ini dan pola investasi masa depan. Laporan Ekonomi Hijau UNEP menyiratkan bahwa rata-rata investasi tambahan tahunan senilai US\$40 miliar akan dibutuhkan untuk menghentikan deforestasi global sebelum tahun 2030 dan untuk menaikkan reforestasi dan aforestasi sebanyak 140 persen sebelum tahun 2050, di bawah skenario *business as usual*²³. Mengingat tegangnya keadaan keuangan publik tingkat global saat ini, sebagai akibat dari beberapa krisis keuangan, modal sektor swasta akan menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan ini.





- **Pelaksanaan:** Inovasi dan investasi membutuhkan berbagai bentuk pelaksanaan untuk memberikan hasil di lapangan. Pada akhirnya, sebagai pengguna lahan terbesar di bumi ini, sektor swasta akan sangat terlibat dalam kegiatan-kegiatan di lapangan yang dibutuhkan untuk transisi menuju ekonomi hijau.

Agar potensi sektor swasta bisa terbuka, paradigma yang ada perlu diubah, dan persoalan struktural yang besar perlu diatasi. Tanda-tanda pasar yang bisa dipengaruhi oleh subsidi, perpajakan, penetapan harga, peraturan dan persoalan penguasaan lahan seringkali berkontribusi dalam membuat deforestasi menjadi kegiatan yang menguntungkan²⁴. Memastikan bahwa paradigma baru ini efisien, efektif dan berkeadilan akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi menyeluruh antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat sipil.

3. Melibatkan sektor swasta dalam REDD+

Sektor swasta bisa ikut aktif dan terlibat lebih jauh dalam REDD+ melalui beragam intervensi dan kegiatan. Intervensi dan kegiatan ini akan bervariasi tergantung pada situasi nasional, serta pada sifat sektor swasta di suatu negara tertentu. Proses keterlibatan bisa memiliki banyak fase, yang bisa meliputi mengidentifikasi pemangku kepentingan, berbagi informasi, konsultasi dan membina kemitraan²⁵. Keterlibatan sangat penting, karena bukan hanya akan memastikan penerimaan luas dan ketertarikan dalam REDD+, melainkan juga akan membangun kepercayaan dan mendukung kapasitas pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dan mencapai REDD+ dengan cara yang berarti dan efektif.

Keterlibatan langsung sektor swasta dalam REDD+ sejauh ini masih terbatas dan sebagian besar terkait dengan pasar karbon sukarela. Kendati demikian, lebih banyak pengalaman telah didapatkan tentang pelibatan sektor swasta dalam kegiatan-kegiatan terkait, seperti inisiatif sertifikasi, perundingan komoditi dan moratorium, yang semuanya bisa membantu menurunkan deforestasi dan degradasi hutan.

Strategi REDD+ nasional akan memiliki pengaruh tidak langsung pada sekelompok besar sektor swasta, dengan banyak kemungkinan implikasi bagi pengguna lahan langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, proses pelibatan akan harus lebih komprehensif lagi dibandingkan yang ada saat ini guna mencerminkan heterogenitas kegiatan sektor swasta di luar pasar karbon. Keterlibatan luas sektor swasta merupakan hal yang penting selama pengembangan strategi dan juga pada fase rancangan kebijakan guna memastikan pemberlakuan mekanisme-mekanisme sosial, keuangan, ekonomi dan politik yang efisien dan efektif untuk memperlambat, menghentikan dan membalikkan hilangnya hutan.

UN-REDD *Programme* bisa memanfaatkan netralitas PBB dalam memfasilitasi, mempromosikan dan mendukung dialog kebijakan REDD+. Program ini bisa mendukung negara-negara REDD+ dalam melibatkan sektor swasta melalui penciptaan dialog pemangku kepentingan nasional, dan juga mendukung inisiatif yang ada di dalam negeri untuk berkontribusi kepada pengembangan kerangka kerja yang bisa diterima umum demi kemajuan REDD+. UN-REDD *Programme* bisa memberikan keahlian dalam berbagai bidang terkait dan memobilisasi para pakar nasional dan internasional untuk meningkatkan pengembangan kapasitas. Dukungan ini

akan berkontribusi kepada pengembangan strategi-strategi praktis untuk memperlambat, menghentikan dan membalikkan hilangnya hutan.

4. Mempengaruhi perilaku sektor swasta – berbagai jenis intervensi

Intervensi yang mengubah dampak yang diberikan oleh sektor swasta pada guna lahan bisa meliputi pelaksanaan kebijakan hingga penciptaan perangkat keuangan, pengembangan skema sertifikasi dan intervensi-intervensi lainnya yang bersifat sukarela. Intervensi-intervensi ini mempengaruhi perilaku melalui berbagai tingkat legalitas, harga dan kesadaran²⁶.

4.1 Intervensi sektor publik

Intervensi sektor publik dibutuhkan untuk mengatasi kegagalan pasar, kebijakan dan pemerintahan yang merupakan faktor penyebab signifikan dari deforestasi dan degradasi hutan global²⁷. Intervensi-intervensi sektor publik yang mempengaruhi sektor swasta bisa dikelompokkan ke dalam beberapa pendekatan yang luas, dan beragam alat yang tersedia di dalam pendekatan-pendekatan ini bisa digunakan. Seperti masalah kompleks lainnya, satu rangkaian intervensi kebijakan optimal pun tidak tersedia, dan efektivitas intervensi akan tergantung pada sejauh mana mereka berhasil beradaptasi dengan konteks setempat. Keempat pendekatan luas tersebut adalah:

- **Insentif:** Mekanisme insentif bisa bersifat positif atau negatif. Insentif digunakan untuk mengarahkan perilaku, tetapi pada akhirnya membiarkan keputusan untuk dibuat oleh pelaku yang sedang dipengaruhi. Contoh dari intervensi yang memberikan insentif kepada perilaku yang ramah hutan mencakup: i) insentif yang tidak terkait dengan keuangan, seperti klarifikasi penguasaan lahan dan memberikan hak yang jelas atas penggunaan lahan²⁸; dan ii) insentif keuangan, yang bisa berupa pembayaran di muka, seperti hibah atau perpajakan, atau pembayaran berdasarkan hasil, seperti pembayaran untuk jasa lingkungan, yang bisa mencakup karbon.
- **Perangkat mitigasi risiko:** Seringkali diberikan oleh komunitas internasional atas dasar pembangunan atau lingkungan dalam konteks bantuan pembangunan resmi atau pendanaan iklim internasional. Dengan tidak adanya reformasi ekonomi yang lebih menyeluruh (lihat 'kondisi pendukung' di bawah), perangkat strategi ini bisa digunakan untuk mengurangi atau berbagi risiko yang terkait dengan kegiatan-kegiatan khusus. Contoh dari perangkat ini mencakup asuransi risiko keuangan, komersial dan politik, jaminan dan perangkat lain yang memitigasi risiko²⁹.
- **Standar minimal perilaku:** Standar-standar ini bisa berlaku dalam beragam skenario untuk mencegah praktik-praktik yang tidak berkelanjutan. Standar-standar ini bisa berlaku atas lahan, seperti ketika dikembangkan di bawah moratorium atau Kitab Undang-undang Kehutanan di banyak negara; bisa berlaku atas informasi, seperti melalui standard wajib untuk





pelabelan dan pelaporan; bisa berlaku atas perdagangan, seperti melalui UU Lacey; dan bisa berlaku atas keuangan, melalui peraturan keuangan atau melalui kriteria sosial dan lingkungan yang ditetapkan oleh organisasi seperti UN-REDD Programme, UNFCCC atau *International Finance Corporation*.

- **Kondisi pendukung:** Solusi mitigasi risiko – sebagaimana yang digambarkan di atas – merupakan solusi jangka pendek untuk menarik investasi dan membangun kepercayaan. Namun, dalam jangka panjang, hanya pemerintah nasional yang bisa melaksanakan proses reformasi yang lebih mendasar dalam struktur politik, struktur hukum, struktur ekonomi dan struktur masyarakat yang akan mengatasi pendorong utama kategori risiko terkait. Rangkaian intervensi struktural ini – bukan intervensi strategi – bisa mencakup reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas, investasi dalam penelitian dan pembangunan infrastruktur, meningkatnya koordinasi antara kementerian dan badan pemerintah, penciptaan sistem informasi yang efektif, investasi dalam pendidikan, kerangka hukum yang sehat, meningkatkan transparansi melalui kerangka pelaporan dan kerangka akuntansi, kapasitas penegakan hukum, tanda-tanda yang jelas tentang kemauan politik yang kuat dan konsultasi pemangku kepentingan³⁰.

4.2 Intervensi sisi permintaan dan penawaran

Walaupun upaya untuk memberikan label yang berlainan pada semua intervensi bisa menjadi upaya yang menantang, cara lain untuk mengkategorisasikan intervensi-intervensi sektor swasta adalah dengan membandingkan langkah-langkah sisi permintaan dengan langkah-langkah sisi penawaran. Langkah-langkah sisi permintaan mengacu pada langkah-langkah yang diambil dimana komoditi digunakan atau dikonsumsi, dan langkah-langkah sisi penawaran mengacu pada

langkah-langkah yang diambil dimana komoditi dihasilkan. Seperti banyak masalah kompleks lainnya, langkah-langkah ini kurang efektif jika diambil secara terpisah, dan hasil positif lebih memungkinkan jika menggunakan kombinasi kebijakan yang saling mendukung³¹.

- **Intervensi sisi permintaan:** Bisa berkisar dari strategi-strategi yang melibatkan paksaan (hukum) sampai strategi-strategi yang melibatkan persuasi (kampanye)³². Intervensi-intervensi ini tidak bisa langsung mempengaruhi tata kelola guna lahan, tetapi bisa menciptakan tanda yang membentuk produksi dan perdagangan komoditi yang membahayakan hutan. Semakin banyak perundang-undangan yang tersedia dalam sektor kayu: UU Lacey di A.S., RUU Larangan Penebangan Liar di Australia dan Peraturan Kayu Uni Eropa, semuanya melarang impor kayu yang dipanen dengan cara yang ilegal. Sektor publik juga bisa mengambil langkah-langkah yang tidak terkait dengan perundang-undangan untuk mengubah permintaan, seperti kebijakan pengadaan produk kayu yang sesuai hukum atau berkelanjutan, yang digunakan oleh beberapa pemerintah di Eropa. Segmen-segmen sektor swasta juga bisa berperan dalam langkah-langkah sisi permintaan. Peran ini bisa mencakup konsumen yang meminta penggunaan standar sertifikasi komoditi (misalnya, Forest Stewardship Council untuk kayu, *Roundtable on Responsible Soy Association* untuk kedelai, *Roundtable on Sustainable Palm Oil* untuk kelapa sawit), janji-janji sukarela baik di tingkat internasional, seperti *Consumer Goods Forum* yang berjanji untuk mencapai tingkat deforestasi netto nol sebelum tahun 2020³³, atau di tingkat nasional, seperti 2.800 anggota *Association of Supermarkets* Brazil yang melarang penjualan daging sapi dari hutan hujan yang dibuka dengan cara yang tidak sesuai hukum³⁴, dan inisiatif pengungkapan sukarela seperti *Forest Footprint Disclosure Project*³⁵.

- Intervensi sisi penawaran: Langkah-langkah ini dilaksanakan di negara-negara hutan dan biasanya berlaku pada awal rantai pasokan. Langkah-langkahnya bisa berupa langkah-langkah hukum, seperti mengklarifikasi konflik dan isu yang terkait dengan penguasaan lahan, mengatasi hambatan-hambatan birokrasi untuk mengubah dan mengklarifikasi peraturan-peraturan yang bertentangan atau yang membingungkan; langkah-langkah teknis, seperti memberikan penyuluhan dan bantuan kepada petani dan produsen untuk beralih ke metode produksi yang lebih berkelanjutan; langkah-langkah tata ruang, seperti pemetaan dan perencanaan lanskap; langkah-langkah keuangan, seperti memberikan dan meningkatkan kemudahan akses ke hibah, pinjaman dan investasi atau menghilangkan insentif-insentif yang menyimpang untuk kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan hilangnya hutan; langkah-langkah informasi, seperti memberikan informasi tentang kecenderungan pasar dan kecenderungan lingkungan untuk membantu pengambilan keputusan yang baik; langkah-langkah teknologi, seperti mendistribusikan sistem pembayaran bergerak (*mobile*) atau menggunakan alat pemetaan; atau yang terkait dengan mereformasi pemerintahan dan lembaga dan meningkatkan penegakan hukum yang bisa mengurangi kegiatan ilegal.

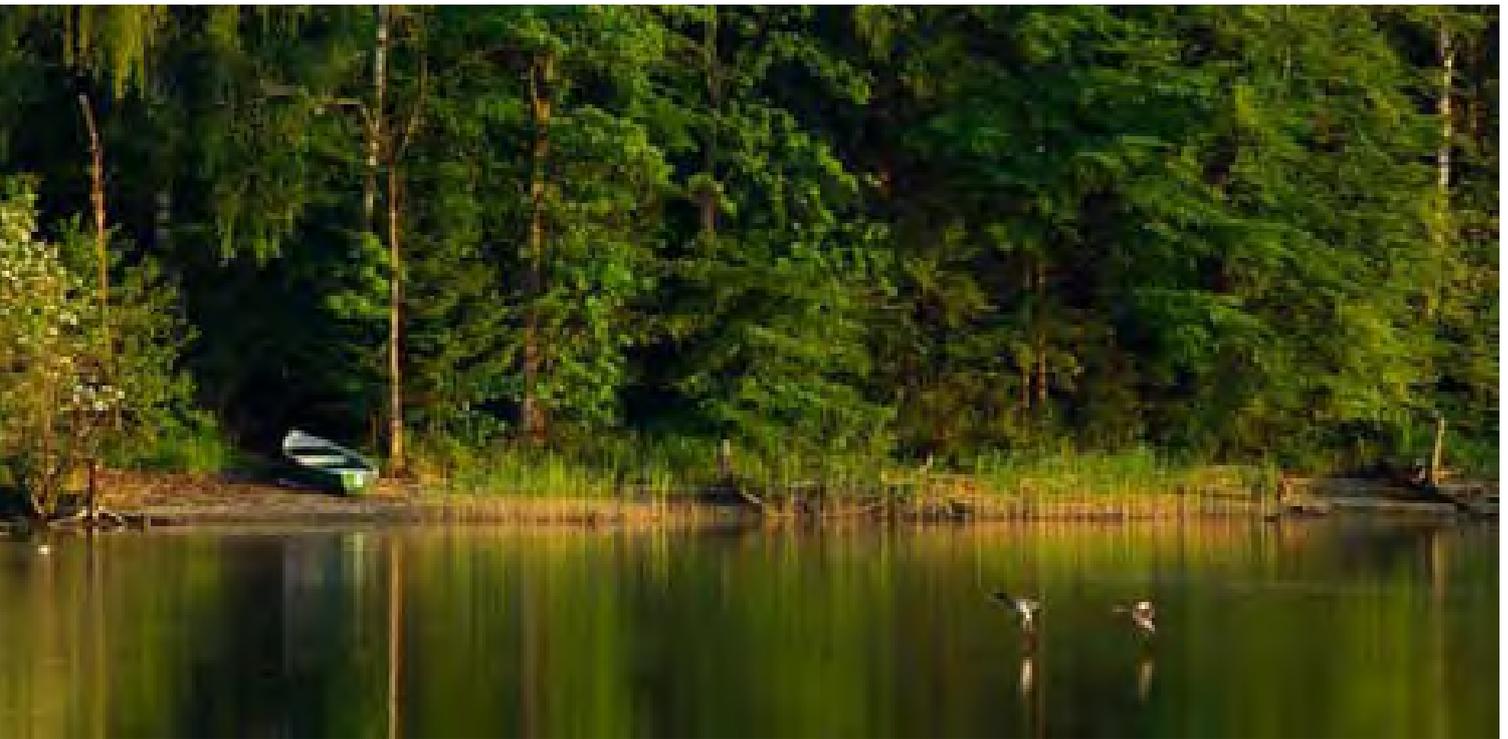
Intervensi-intervensi ini tidak perlu, dan seringkali sebaiknya tidak, dilakukan secara terpisah. Misalnya, langkah-langkah yang diperkenalkan di bawah Rencana Aksi Pencegahan dan Pengendalian Deforestasi di Legal Amazon (negara-negara bagian Amazon) Brazil

mencakup inisiatif-inisiatif seperti koordinasi antar kementerian yang lebih besar, pengawasan hutan waktu nyata (*real-time*), perluasan wilayah yang terlindungi, penetapan kota-kota tertentu yang berisiko tinggi sebagai prioritas untuk pelaksanaan langkah-langkah yang lebih ketat, revisi undang-undang lingkungan dan kebijakan kredit pedesaan yang terkait dengan kepatuhan lingkungan. Platform-platform seperti *Green Commodities Facility* UNDP merupakan cara lain untuk menggabungkan banyak unsur ini di tingkat nasional³⁶. Keterlibatan UNDP dengan skema Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) merupakan contoh praktis tentang keterlibatan pemangku kepentingan seputar komoditi yang membahayakan hutan di tingkat negara³⁷.

5. Potensi peran perantara keuangan dalam mengatasi pendorong deforestasi dan degradasi

Perantara keuangan (FI) memenuhi banyak fungsi yang dibutuhkan agar sekelompok besar sektor swasta bisa beroperasi (termasuk kedua kategori yang digambarkan di atas)³⁸. FI merupakan faktor kritis dalam pengaktifan sebagian besar rantai pasokan komoditi global yang mendorong deforestasi dan degradasi hutan. Banyak kegiatan fisik yang terkait dengan tata guna lahan, seperti menanam, memanen atau berdagang, biasanya membutuhkan satu atau lebih transaksi keuangan pendukung. Dengan demikian, perubahan cara FI beroperasi, serta perubahan kebijakan pinjaman, keputusan investasi dan keputusan penilaian kesesuaian nasabah untuk menerima pinjaman, bisa memberikan pengaruh besar pada perilaku pelaku swasta sepanjang berbagai rantai pasokan komoditi global.





Contoh-contoh berikut menggambarkan berbagai cara yang bisa digunakan oleh FI untuk berkontribusi dalam memperlambat, menghentikan dan membalikkan hilangnya hutan dengan mempengaruhi perilaku sektor swasta.

Bank

Peran utama yang dimainkan oleh bank adalah meminjamkan uang kepada nasabah, atau 'memberikan kredit'. Ada beragam jasa lain yang bank berikan, yang mungkin akan mempengaruhi perilaku, seperti melaksanakan penelitian terhadap perusahaan, membantu perusahaan mendapatkan uang di pasar modal dan jasa pemberian nasihat. Dua studi kasus berikut merupakan contoh tentang berbagai cara bank bisa mempengaruhi perilaku secara langsung maupun tidak langsung:

- Kebijakan pinjaman di daerah-daerah pedesaan di Amazon Brazil (standar minimal perilaku)³⁹: Laju deforestasi Brazil turun drastis di Amazon di paruh kedua tahun 2000-an, dari puncaknya seluas 27.000 km² pada tahun 2004 menjadi 5.000 km² pada tahun 2011⁴⁰. Dua kemungkinan penjelasan untuk hal ini adalah bahwa turunnya harga komoditi pertanian mungkin telah mencegah pembukaan wilayah hutan untuk perluasan lahan pertanian atau kebijakan konservasi yang diperkenalkan setelah tahun 2004 mungkin telah berhasil dilakukan. Analisa oleh *Climate Policy Initiative* (CPI) menunjukkan bahwa kebijakan yang diperkenalkan guna mencapai hasil konservasi menghasilkan sekitar setengah penurunan deforestasi.

Salah satu kebijakan yang diperkenalkan pada tahun 2008 adalah *Central Bank Resolution 3545* Brazil. Kebijakan ini

mewajibkan mereka yang mengajukan pinjaman di daerah-daerah pedesaan di bioma Amazon untuk menghasilkan bukti kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Pinjaman atau kredit pedesaan merupakan mekanisme utama guna mendukung pertanian di Brazil, dan Kementerian Pertanian memperkirakan bahwa sekitar 30 persen sumber daya petani selama tahun panen biasa, berasal dari pinjaman pedesaan. Analisa yang dilakukan oleh CPI terhadap kebijakan tersebut menghasilkan temuan bahwa kebijakan tersebut paling efektif di daerah-daerah yang didominasi oleh peternakan, bukan oleh produksi hasil tanaman. Diperkirakan sejumlah BRL2,9 miliar (US\$1,4 miliar) dalam kredit pedesaan tidak terkonsentrasi pada periode tahun 2008 hingga tahun 2011 dikarenakan larangan yang dikenakan oleh *Resolution 3545*. Hal ini mencegah terdeforestasinya sekitar 2.700 km² yang setara dengan penurunan 15 persen deforestasi selama periode yang diamati.

- Program jaminan pinjaman *United States Agency for International Development* (USAID) (perangkat mitigasi risiko)⁴¹: Development Credit Authority (DCA) USAID memberikan jaminan pinjaman guna mendorong lembaga-lembaga keuangan penghindar risiko, untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang sebenarnya memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman tetapi belum terlayani di negara-negara berkembang. Skema ini telah berjalan sejak tahun 1999 dan telah memfasilitasi lebih dari US\$2,3 miliar pendanaan swasta melalui 200 lembaga keuangan lokal di 64 negara. Jaminan pinjaman ini bisa menutupi 50 persen potensi kerugian yang mengancam bank atau investor lokal, yang tunduk pada kriteria sosial dan lingkungan yang ketat.

Jaminan ini bisa menutupi pinjaman individu atau portofolio pinjaman dan memiliki dampak yang cukup memberikan manfaat, yang membantu membuka investasi sektor swasta guna mendorong sasaran-sasaran pembangunan. Sejak program DCA dimulai pada tahun 1999, telah ada rata-rata US\$28 dana sektor swasta yang digalang untuk setiap dolar yang dikeluarkan oleh pemerintah AS. Walaupun telah berfokus, antara lain, pada pertanian, DCA tidak digunakan untuk REDD+. Kesesuaian DCA untuk dana REDD+ perlu diteliti lebih lanjut. Program-program jaminan pinjaman bisa membantu meningkatkan pasokan kredit ke sektor ekonomi utama dimana akses ke dana merupakan salah satu hambatan yang mencegah transisi menuju produksi yang lebih berkelanjutan⁴².

Investor kelembagaan

Investor kelembagaan merupakan pemilik akhir sebagian besar ekuitas perseroan terbuka. Dengan demikian, praktik-praktik keputusan dan kepemilikan investasi mereka bisa sangat mempengaruhi perilaku perusahaan yang mereka miliki dan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Studi kasus di bawah ini memperlihatkan bagaimana investor kelembagaan bisa mendorong perubahan perusahaan.

- Investasi kelapa sawit dari *Government Pension Fund Global* (GPF) Norwegia⁴³: *Sovereign Wealth Fund* di Norwegia, yang disebut GPF, adalah salah satu yang terbesar di dunia. Dua organisasi non pemerintah di Norwegia, *Rainforest Foundation Norway* dan *Friends of the Earth Norway*, belakangan ini baru melobi GPF untuk mengurangi investasinya di perusahaan-perusahaan dalam sektor-sektor sensitif yang bisa berkontribusi kepada hilangnya hutan, seperti kelapa sawit di Kalimantan dan produksi daging sapi di Amazon. Laporan tahunan GPF 2012 menyatakan bahwa deforestasi sekarang merupakan komponen eksplisit strategi dana ini untuk pengelolaan sosial dan lingkungan. Sebagai hasil dari kebijakan baru ini, GPF mencabut sekitar US\$300 juta investasi ekuitas di 23 perusahaan yang dianggapnya memproduksi kelapa sawit dengan cara yang tidak berkelanjutan. Langkah ini mengirimkan pesan yang kuat baik kepada sektor kelapa sawit maupun investor-investor lainnya bahwa ada sangat banyak pengelola pendanaan kelembagaan yang mengharapkan standar yang semakin tinggi dalam hal kerangka pengaman (*safeguard*) sosial dan lingkungan, dan bahwa model-model usaha yang dikaitkan dengan hilangnya hutan tidak bisa diterima oleh investor-investor yang bertanggung jawab.

Kesimpulan

Pergeseran menuju ekonomi hijau merupakan satu-satunya lintasan pembangunan berkelanjutan yang berjangka panjang; business-as-usual bukan opsi yang bisa dijalankan. REDD+ merupakan bagian kritis dari ekonomi hijau, dan keterlibatan serta partisipasi aktif sektor swasta merupakan prasyarat bagi keberhasilan REDD+. Jika keterlibatan menyeluruh tidak diprioritaskan, ada kemungkinan besar mekanisme-mekanisme sosial, keuangan, ekonomi dan politik yang dirancang untuk mengurangi hilangnya hutan akan menjadi tidak efektif, membuang waktu berharga dan modal manusia, politik dan keuangan yang langka.

UN-REDD *Programme* berkomitmen untuk membantu negara-negara REDD+ terlibat dengan para pemangku kepentingan utama, termasuk sektor swasta. Program ini bisa memainkan peran mengadakan pertemuan dan katalisasi guna memastikan bahwa kepercayaan dan konsensus dibangun, bersama dengan peningkatan kapasitas dan pengetahuan. UN-REDD *Programme* melibatkan sektor swasta melalui dialog-dialog pemangku kepentingan nasional di sejumlah negara percontohan (*pilot*) dan melalui kegiatan-kegiatan regional dan global; dan akan terus membantu negara-negara mitra UN-REDD dalam menjembatani 'perbedaan sudut pandang' yang ada antara sektor swasta dengan para pelaku lain dalam REDD+.



Ucapan Terima Kasih

Para penulis sangat berterima kasih atas komentar dan masukan yang diberikan oleh: Emily Brickell (*Overseas Development Institute*), Tim Clairs (UNDP), Anna Creed (yang bekerja untuk Duta Besar Keliling Bidang Three Basins Initiative), Thomas Enters (UNEP), Julie Greenwalt (UNEP), Kimberly Todd (UNDP), Okwen TenjohOkwen (FAO) dan Tiina Vahanen (FAO).

Catatan Akhir

¹ Istilah 'hilangnya hutan' selanjutnya akan digunakan untuk merujuk baik pada deforestasi maupun degradasi hutan.

² UNEP. 2011. *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*.

³ Walaupun nilai jasa ekosistem hutan memiliki tingkat yang tidak pasti, estimasi konservatif cenderung diukur dalam triliun dolar AS (UNEP 2011). Di bawah kerangka akuntansi yang ada saat ini, nilai dan jasa ini tidak tertangkap dalam sistem akuntansi nasional. Namun, FAO menunjukkan bahwa nilai dan jasa yang bisa diukur dalam pengertian moneter memiliki arti penting. Industri hutan di tahun 2006 memberikan kontribusi sekitar US\$468 miliar atau satu persen dari nilai tambah bruto global terhadap produk domestik bruto global. FAO. 2009. *State of the world's forests 2009*.

⁴ FAO. 2010. *Global Resources Assessment*.

⁵ Rockström, J dkk. 2009. *Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity*. *Ecology and Society* 14 (2): 32.

⁶ Eliasch, J. 2008. *The Eliasch Review- climate change: Financing global forests*.

⁷ Misalnya, studi oleh TEEB untuk Business Coalition menunjukkan bahwa peternakan dan pertanian di Amerika Selatan menghasilkan pendapatan sejumlah US\$16,6 miliar, tetapi memakan modal alam sejumlah US\$312,1 miliar. Trucost. 2013. *Natural Capital at Risk: The Top 100 Externalities of Business*.

⁸ UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai ekonomi yang menghasilkan meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sementara sangat mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. Ekonomi ini rendah karbon, efisien sumber daya dan secara sosial inklusif. UNEP. 2011. *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*.

⁹ International Sustainability Unit. 2012. *Interim REDD+ Finance, Current Status and Ways Forward for 2013-2020*.

¹⁰ United Nations. 2009. *Guidelines on Cooperation between the United Nations and the Private Sector*.

¹¹ Untuk definisi sektor informal, lihat ICLS. 2003. *Pedoman tentang definisi statistik pekerjaan informal*.

¹² Dua kelompok umum ini tidak terpisah dari satu sama lain - misalnya seorang petani bisa mengatasi pendorong deforestasi sementara juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan penurunan emisi terverifikasi.

¹³ Ecosystem Marketplace. 2012. *State of the Forest Carbon Markets 2012: Leveraging the Landscape*.

¹⁴ Pendorong-pendorong ini merupakan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan hilangnya hutan.

¹⁵ Pertanian diperkirakan akan segera menjadi pendorong sekitar 80 persen deforestasi di dunia (Kissinger dkk. 2012). Kedelai, kelapa sawit dan ternak merupakan komoditi utama yang mendorong hilangnya hutan dalam sektor pertanian, tetapi sektor-sektor lain di luar pertanian seperti pertambangan dan konstruksi merupakan pendorong penting deforestasi juga. Kissinger dkk. 2012. *Drivers of Deforestation and Forest Degradation: A Synthesis Report for REDD+ Policy Makers*.

¹⁶ Barang yang dihasilkan oleh banyak produsen skala kecil bisa memiliki nilai yang cukup tinggi. Misalnya, sektor manufaktur arang di Republik Demokratik Kongo diperkirakan menghasilkan pendapatan tahunan lebih dari US\$1 miliar. Debroux, L. dkk. 2007. *Forests in post-conflict Democratic Republic of Congo: Analysis of a priority agenda*.

¹⁷ Global Canopy Programme. 2012. *The Little Forest Finance Book*.

¹⁸ FAO. 2012. *State of the World's Forests 2012*.

¹⁹ UNEP. 2011. *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*.

²⁰ Bates dkk. 2008. *Climate Change and Water*. Technical Paper of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Secretariat.

²¹ UNEP. 2012. *Fifth Global Environment Outlook (GEO-5): Summary for Policy Makers*.

²² Antara 300 sampai 500 perusahaan mengendalikan sekitar 70 persen rantai pasokan 15 komoditi besar di tingkat global dan oleh karena itu bisa memiliki beragam tingkat pengaruh pada bagaimana rantai pasokan ini beroperasi. WWF. 2012. *Better Production for a Living Planet*.

²³ UNEP. 2011. *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*.

²⁴ TEEB. 2010. The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature: A synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB.

²⁵ CIF Learning. 2013. Incentivizing the Involvement of the Private Sector in REDD+.

²⁶ Untuk diskusi lengkap tentang kemungkinan rentang intervensi dan lingkungannya, lihat Whitley, S. 2013. At cross-purposes: subsidies and climate compatible investment.

²⁷ Kissinger dkk. 2012. Drivers of Deforestation and Forest Degradation: A Synthesis Report for REDD+ Policy Makers. Untuk diskusi lengkap tentang perlunya intervensi publik, lihat Creed, A. 2013. Halting and Reversing Forest Loss at Jurisdictional Scale: How Interim Climate Finance can Incentivise the Private Sector.

²⁸ Pemberian hak atas lahan juga bisa dipandang sebagai kondisi pendukung.

²⁹ Untuk informasi lebih lanjut tentang berbagai produk mitigasi risiko, lihat Bab 4 The Forest Investment Report by Gaines dan Grayson. 2009. Forum for the Future.

³⁰ Kissinger dkk. 2012. Drivers of Deforestation and Forest Degradation: A Synthesis Report for REDD+ Policy Makers.

³¹ Harus diingat, ada tantangan-tantangan yang terkait dengan mengukur efektivitas intervensi. Hal ini bisa dikarenakan kurangnya bukti empiris dan potensi kebocoran (atau perpindahan) ke daerah lain.

³² IIED. 2013. Demand-side interventions to reduce deforestation and forest degradation.

³³ Consumer Goods Forum merupakan jaringan industri global tingkat tinggi yang beranggotakan lebih dari 400 pedagang eceran, manufaktur, penyedia jasa dan pemangku kepentingan lainnya dengan penjualan gabungan sebesar EUR2,5 triliun.

³⁴ Untuk informasi lebih lanjut, lihat: www.abras.com.br/supermercadosustentavel/seguranca-alimentar/carne/ministerio-publico-federal-e-abras-assinam-termo-de-cooperacao-tecnica-pela-pecuaria-sustentavel/

³⁵ Forest Footprint Disclosure Project digabungkan dengan Carbon Disclosure Project pada Februari 2013.

³⁶ Untuk informasi lebih lanjut tentang Green Commodities Facility UNDP, lihat: www.greencommodities.org/

³⁷ Untuk informasi lebih lanjut tentang Skema Indonesia Sustainable Palm Oil, lihat: www.undp.or.id/press/view.asp?FileID=20121220-1&lang=en

³⁸ Walaupun FI memilih paparan kegiatan pada skala dimana risiko bisa dinilai dengan jelas, hal ini sejalan dengan program-program REDD+ nasional berskala besar. Untuk diskusi lengkap, lihat International Sustainability Unit. 2012. REDD+ and the Agricultural Drivers of Deforestation.

³⁹ Materi untuk studi kasus ini diambil dari karya tulis Climate Policy Initiative. 2013. Does Credit Affect Deforestation? Evidence from a Rural Credit Policy in the Brazilian Amazon.

⁴⁰ Untuk data resmi, lihat: www.obt.inpe.br/prodes/index.php

⁴¹ Untuk informasi lebih lanjut tentang Development Credit Authority USAID, lihat: www.usaid.gov/dca/dca-impact-brief

⁴² Untuk studi-studi kasus tentang akses ke pendanaan yang merupakan bagian dari hambatan dalam mencapai metode produksi yang lebih berkelanjutan, lihat International Sustainability Unit. 2012. REDD+ and the Agricultural Drivers of Deforestation.

⁴³ Materi untuk studi kasus ini diambil dari Rainforest Foundation Norway. 2013. Beauty and the Beast. Norway's investments in rainforest protection and rainforest destruction.

Penerjemahan Ikhtisar Kebijakan ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dilakukan oleh United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia (UNORCID). Walaupun segala upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa versi bahasa Indonesia ini mewakili isi dari Ikhtisar Kebijakan versi bahasa Inggris, harap diingat bahwa versi bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh UN-REDD Programme adalah versi yang resmi. Silahkan merujuk pada Ikhtisar Kebijakan No. 4 versi Bahasa Inggris sebagai pedoman ketika dibutuhkan.

Photo credits

Inside spread: © UN Photo/Wolff; © UN Photo/R Kollar;

© UN Photo/Lamphay Inthakoun

© FAO/Roberto Faidutti; © FAO/Mette Loyche Wilkie

Images sourced from: www.un.org; www.fao.org

UN-REDD Programme Secretariat

International Environment House,
11-13 Chemin des Anémones,
CH-1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland.

un-redd@un-redd.org

www.un-redd.org



UN-REDD
PROGRAMME



The United Nations Collaborative Programme
on Reducing Emissions from Deforestation and
Forest Degradation in Developing Countries